



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA KE-6 (Lanjutan)
MASA SIDANG I - TAHUN SIDANG 2005-2006**

Gedung Nusantara V, 30 September 2005

1. Pembukaan Sidang Paripurna ke-6 (Lanjutan) DPD

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, skor kami cabut dan Sidang Paripurna ke-6 (Lanjutan) Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna ke-6 (Lanjutan) DPD ini mempunyai 7 (tujuh) agenda pokok yaitu:

- 1) Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan DPD RI kepada DPR Atas Laporan Pengawasan PAH I, PAH II, dan PAH III;
- 2) Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Jadwal Persidangan DPD Masa Sidang II Tahun Sidang 2005-2006;
- 3) Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Perubahan Kedua Peraturan Tata Tertib DPD;
- 4) Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang RUU Hak-hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara;
- 5) Pengesahan Usul RUU Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara;
- 6) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas BK, PURT, PKALP, dan Kelompok DPD di MPR;
- 7) Penutupan Masa Sidang I DPD Tahun Sidang 2005-2006, dengan penyampaian Pidato Penutupan oleh Pimpinan DPD.

3. Hasil Pemeriksaan BPK

- Sebagaimana tadi kita ikuti bersama bahwa kita telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berkenaan dengan itu berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat (3) Peraturan Tata Tertib, DPD perlu menugasi Panitia Ad Hoc untuk membahas hasil Pemeriksaan BPK tersebut. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib, Panitia Ad Hoc yang mempunyai ruang lingkup tugas menangani hasil pemeriksaan BPK adalah Panitia Ad Hoc IV.
- Untuk itu, dalam sidang yang mulia ini kita perlu menugasi Panitia Ad Hoc IV guna membahas hasil pemeriksaan BPK dimaksud. Mengingat kita akan segera memasuki masa kegiatan di daerah pemilihan masing-masing, maka pembahasan terhadap Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 oleh Badan Pemeriksa Keuangan akan kita selenggarakan setelah Anggota menyelenggarakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.

- Selanjutnya Panitia Ad Hoc IV melaporkan hasil pembahasannya dalam Sidang Paripurna yang akan datang untuk ditetapkan sebagai masukan DPD, kemudian masukan tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPD kepada DPR. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) dan ayat (5).
4. Sekarang marilah kita memasuki **Acara pertama**, yaitu Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan DPD RI kepada DPR Atas Laporan Pengawasan PAH I, PAH II, dan PAH III. Namun sebelum itu, kami persilakan kepada pimpinan masing-masing PAH tersebut untuk menyampaikan secara singkat laporan hasil pengawasannya. Pada kesempatan pertama kami persilakan Pimpinan PAH I, kemudian secara berturut-turut Pimpinan PAH II dan PAH III.
 5. **Acara Kedua**, Pengesahan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Jadwal Persidangan DPD Masa Sidang II Tahun Sidang 2005-2006. Sebelum kami memintakan persetujuan sidang yang mulia ini, kami persilakan kepada Pimpinan Panitia Musyawarah untuk menyampaikan secara garis besar mengenai Rancangan Jadwal Persidangan DPD Masa Sidang II Tahun Sidang 2005-2006.
 6. Mengingat waktu, maka Sidang Paripurna ini kembali akan kami skor untuk memberikan kesempatan bagi yang beragama Islam untuk melaksanakan Sholat Jumat. Selain itu, kita akan mengadakan syukuran dalam rangka 1 (satu) tahun kelahiran DPD. Dalam acara tersebut akan disampaikan bantuan DPD kepada putera-puteri dari Bapak Almarhum Drs. H. Abdul Halim Harahap sebagai wujud kepedulian dan solidaritas keluarga besar Anggota DPD.

Berkenaan dengan itu Sidang Paripurna ini kami skor sampai dengan pukul 14.00 WIB.

----- SIDANG PARIPURNA DPD DISKOR-----

7. Sidang Paripurna ke-6 (Lanjutan) dimulai kembali

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, skor kami cabut dan Sidang Paripurna ke-6 (Lanjutan) Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka.

8. Pagi tadi kita telah berhasil mengesahkan Rancangan Keputusan DPD RI tentang Pertimbangan DPD RI yang merupakan hasil Pengawasan PAH I, PAH II, dan PAH III, dan mengesahkan Rancangan Jadwal Persidangan DPD Masa Sidang II Tahun Sidang 2005-2006.

Sekarang marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu Pengesahan 3 (tiga) Rancangan Keputusan DPD RI yang merupakan hasil penyusunan PPUU, yakni: tentang Perubahan Kedua Peraturan Tata Tertib DPD, Usul RUU Hak-hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara serta Mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara, dan Usul RUU Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Sebelum kami memintakan persetujuan sidang yang mulia ini, kami persilakan kepada Pimpinan PPUU untuk menyampaikan secara garis besar mengenai ketiga rancangan tersebut.

9. Acara selanjutnya adalah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas BK, PURT, PKALP, dan Kelompok DPD di MPR. Untuk itu, kami persilakan kepada masing-masing pimpinannya untuk menyampaikan laporan.
10. **Pidato Ketua DPD dalam rangka Penutupan Masa Sidang I DPD Tahun Sidang 2005-2006**, dengan pokok-pokok materi pidato Ketua DPD sebagai berikut:

Sidang Dewan yang terhormat,

- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) [**Pasal 71 ayat (2) – sesuai TATIB baru**] Peraturan Tata Tertib DPD, sebelum menutup Sidang Paripurna Masa Sidang I DPD Tahun Sidang 2005-2006, kami selaku Pimpinan DPD akan menyampaikan pidato penutupan yang menguraikan hasil kegiatan selama masa sidang ini dan berbagai masalah yang perlu mendapat perhatian kita bersama kedepan.

- Memasuki awal persidangan DPD Masa Sidang I Tahun 2005-2006 kita telah menorehkan satu lembaran baru dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan kita dengan menyelenggarakan Sidang Paripurna DPD dengan acara mendengarkan Pidato Presiden tentang Pembangunan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006. Berlangsungnya sidang ini merupakan wujud kesepakatan antara DPD dan Presiden untuk mengembangkan sebuah konvensi dan tradisi politik kelembagaan negara dalam sistem demokrasi kita.
- Penyelenggaraan Sidang Paripurna DPD yang dihadiri pula oleh para Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan partai-partai politik serta representasi dari DPR RI, mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat sebagai suatu kegiatan yang dapat membawa manfaat untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mendukung upaya peningkatan kemajuan daerah sebagai bagian esensial dari kemajuan nasional. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menyinergikan kepentingan seluruh *stakeholders* baik pusat maupun daerah melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan menyeluruh.
- Menjadi harapan dan dambaan kita semua, hubungan yang tengah dibangun antara DPD dengan Presiden mengarah kepada pola hubungan yang sinergis, konstruktif, dan demokratis. Harapan yang sama juga kita sampaikan kepada DPR untuk melangkah ke depan secara bersama-sama guna merumuskan pola hubungan antara sesama lembaga perwakilan yang saling membawa manfaat dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.
- Terkait dengan hubungan kerja antara DPD dan DPR sesuai dengan konstitusi kita, sebagaimana yang tadi telah dilaporkan, dalam Masa Sidang I ini *Alhamdulillah* DPD telah menyampaikan pertimbangan kepada DPR tentang **APBN Perubahan II Tahun Anggaran 2005 dan RAPBN Tahun Anggaran 2006** yang disusun oleh PAH IV. Selain itu, DPD telah menyampaikan pandangan dan pendapat berkenaan dengan Penetapan **PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU** dan Penetapan **PERPU Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara**, yang disusun oleh PAH I.

Sidang Dewan yang terhormat,

- Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2005-2006 yang singkat ini yakni dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 30 September 2005, seluruh Alat Kelengkapan DPD khususnya Panitia Ad Hoc telah menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Melalui kerja keras yang dilakukan oleh masing-masing Panitia Ad Hoc, maka selain telah menyampaikan pertimbangan mengenai berbagai rancangan undang-undang, sesuai dengan kewenangan DPD akan menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu kepada DPR, sebagaimana tadi yang dilaporkan dalam Sidang Paripurna ini.
- Di samping DPD telah dan akan menyampaikan pertimbangan dan hasil pengawasan, dalam Masa Sidang yang akan datang DPD berupaya akan menyampaikan usul rancangan undang-undang. Sebagaimana yang dilaporkan tadi, DPD akan menyampaikan Usul **RUU tentang Pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara** dan mengingat hak keuangan/administratif Pimpinan dan Anggota DPD termasuk Lembaga Negara baru lainnya belum diatur dalam Undang-Undang, maka DPD berinisiatif mengajukan Usul **RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara**. Sehingga peran DPD akan lebih memfokuskan pada penyusunan RUU yang berkaitan dengan bidang tugas DPD sebagaimana diamanatkan konstitusi, mengingat kinerja kita akan diukur dari seberapa besar usaha kita dalam upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Aspirasi masyarakat dan daerah tersebut di antaranya akan tercermin dari kebijakan-

kebijakan nasional yang dituangkan dalam undang-undang, yang dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah.

- Untuk mendukung kegiatan DPD di bidang penyusunan rancangan undang-undang, Pimpinan DPD bersama Pimpinan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan Pimpinan Badan Kerjasama DPRD Provinsi Seluruh Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2005 yang lalu telah menandatangani Komitmen Bersama.

Komitmen Bersama tersebut antara lain memuat kesepakatan dan tekad untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan segala kemampuan dan potensi yang ada di setiap provinsi dengan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabel, dan berkeadilan sosial; Memberantas korupsi di Pemerintahan Daerah; Memperjuangkan konsep Peraturan Pemerintah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memuat perluasan kewenangan daerah dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah; dan melakukan kerjasama penelitian, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembentukan peraturan daerah, dan lain-lain dalam rangka memajukan pembangunan daerah.

Untuk menindaklanjuti Komitmen Bersama tersebut, direncanakan pada tanggal 7 Oktober 2005 akan diadakan pertemuan antara DPD dan APPSI.

- Pada kesempatan ini, kami, dan saya kira kita semua, wajib memberi selamat dan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan kita yang ada di PAH I, II, III, dan IV, serta Badan Kehormatan, Panmus, PPUU, PURT, PKALP, dan kelompok DPD di MPR, periode Masa Sidang 2004-2005 yang telah bekerja keras dan menghasilkan berbagai prestasi meskipun belum maksimal oleh keadaan yang serba terbatas.
- Dalam keterbatasan itu upaya kita terutama Kelompok Anggota DPD di MPR diharapkan dapat memperjuangkan amandemen UUD 1945 sebelum masa bakti kita berakhir, untuk memberdayakan DPD sehingga dapat menjalankan perannya secara sungguh-sungguh sebagai sebuah lembaga legislatif, dan dapat memenuhi aspirasi dan harapan terhadap DPD.

Sidang Dewan yang terhormat,

- Perlu kami informasikan bahwa setelah Sidang Paripurna DPD ini, anggota DPD akan melakukan kegiatan di daerah pemilihannya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2005. Sidang Paripurna DPD selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2005 yang merupakan awal Masa Sidang II DPD.
- Kami mengharapkan kepada Saudara-saudara Anggota DPD agar pada saat melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing dapat memantau perkembangan yang terjadi di daerah, dan melaporkannya pada Pembukaan Masa Sidang II DPD yang akan datang untuk dibahas lebih lanjut oleh masing-masing Alat Kelengkapan.
- Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Beberapa kejadian pelaksanaan Pilkada yang lalu, yakni terjadinya pandangan berbeda secara tajam, kerusuhan yang menimbulkan berbagai kerusakan, serta berbagai kelemahan lainnya, agar diupayakan tidak terjadi di daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
- Kita juga harus memberikan perhatian pada persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang menurut keterangan, baik yang disampaikan pada saat Rapat Kerja antara PAH II dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun penjelasan yang disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kalla pada acara silaturahmi dengan Pimpinan DPD, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan Anggota DPD dari Provinsi yang tidak terwakili dalam unsur Pimpinan, dalam waktu dekat ini Pemerintah akan menaikkan kembali harga BBM. Kenaikan harga BBM itu sendiri telah disetujui DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 28 September 2005.

Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, kenaikan harga BBM tentu akan menambah berat beban hidup masyarakat lapisan bawah, terlebih kita akan memasuki Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Kondisi ini diperparah dengan kelangkaan BBM yang diantaranya disebabkan oleh lemahnya pendistribusian dan penyelundupan BBM yang dilakukan aparat, yang justru seharusnya ikut mengamankan jaringan distribusi BBM di daerah.

Apabila kenaikan harga tersebut benar-benar terjadi, DPD harus secara seksama memantau dampak dari kenaikan harga BBM dan pelaksanaan penyaluran dana kompensasi pengalihan subsidi BBM. Dalam kunjungan kerja ke daerah, kita perlu mencermati data masyarakat miskin di daerah masing-masing, agar pengalokasiannya tepat sasaran dan dikelola secara transparan serta akuntabel. Termasuk kompensasi kenaikan harga BBM untuk pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kesehatan.

- Masalah lainnya yang juga perlu mendapat perhatian pada saat kita melaksanakan kegiatan di daerah adalah mengenai masalah kesehatan masyarakat, terutama berkenaan dengan wabah penyakit flu burung yang menyerang peternakan unggas dan bahkan telah menularkannya kepada manusia yang dapat menyebabkan kematian. Kiranya flu burung yang berpotensi menjadi pandemi, perlu kita pantau upaya penanganan dan pencegahan lebih lanjut mengenai wabah penyakit tersebut di daerah masing-masing. Masalah kesehatan lainnya seperti kasus busung lapar dan gizi buruk serta penyakit polio walaupun akhir-akhir ini tidak terberitakan, juga tidak boleh luput dari pemantauan kita bersama. Secara umum para Anggota DPD perlu memantau mengenai sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat apakah berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kondisi dari rumah sakit, puskesmas-puskesmas pembantu, dan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan.

Sidang Dewan yang terhormat,

- Sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPD bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia telah menyediakan fasilitas SMS 4 Digit. Dengan fasilitas ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada DPD melalui telepon, Flexi, dan Telkomsel ke nomor 3737. Di masa yang akan datang, selain bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, DPD akan mengembangkan kerja sama tersebut dengan *provider* lainnya. Dalam kaitan ini, ketika berada di daerah kita perlu menginformasikan kepada masyarakat mengenai adanya fasilitas tersebut.

11. Sebelum menutup Sidang Paripurna ke-6 (Lanjutan) DPD, berkenaan dengan akan datangnya Bulan Suci Ramadhan, kami atas nama Pimpinan menyampaikan permohonan maaf lahir dan bathin dan mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa bagi umat Islam. Semoga dalam memasuki bulan suci yang penuh rahmat dan ampunan ini, kita semua, khususnya bagi yang beragama Islam senantiasa diwarnai pula dengan kesucian hati, dan pada gilirannya nanti kita akan kembali kepada fitrah manusia yang dihiasi dengan kefitrian.

Akhirnya, dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Sidang Paripurna Ke-7 Dewan Perwakilan Daerah kami tutup. *Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warohamatullahi Wabarokatuh.*
